

PERUBAHAN HUNIAN PADA HUNIAN TETAP GUNUNG MERAPI DAN PENGARUHNYA PADA EKONOMI KELUARGA

Maria Ariadne Dewi Wulansari¹, Felix Wisnu Isdaryadi²

¹Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Surel: ¹ maria.ariadne.d@ugm.ac.id; ² felix.wisnu@uajy.ac.id

Vitruvian vol 12 no 2 Februari 2023

Diterima: 09 01 2023 | Direvisi: 01 02 2023 | Disetujui: 13 02 2023 | Diterbitkan: 28 02 2023

ABSTRAK

Dalam program rekonstruksi paska erupsi Merapi, warga korban bencana dipindahkan ke lokasi yang aman dan telah diberi hunian tetap berupa rumah inti seluas 36 m². Dalam studi ini, dilakukan pengamatan pada warga Hunian Tetap (Huntap) Pagerjurang, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta untuk menilai kaitan perekonomian keluarga korban bencana dengan fenomena perubahan hunian sebagai pengembangan mandiri yang telah dilakukan oleh pengguna. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap 90 warga huntap, lalu diolah dengan statistik sederhana. Dari pengamatan yang dilakukan, warga Huntap Pagerjurang telah melakukan upaya renovasi untuk menyesuaikan kebutuhan ruang dalam huniannya. Kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil paska bencana tidak menghalangi warga Huntap untuk melakukan perubahan fisik bangunan huniannya sesuai dengan kebutuhan maupun keinginannya. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan finansial ini. Dari temuan ini, muncul dugaan bahwa skema rumah dan kawasan tumbuh yang mudah untuk dikembangkan secara mandiri sesuai kebutuhan penggunanya sangat perlu dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam solusi perumahan paska bencana di kemudian hari.

Kata Kunci: hunian tetap, paska bencana, ekonomi keluarga, pengembangan mandiri

ABSTRACT

In the post-eruption reconstruction program of Merapi, disaster victims were relocated to a safe location and given permanent housing (a 36 m² core house). In this study, observations were made on residents of Permanent Residents (Hunian Tetap – Huntap) Pagerjurang, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta to assess the correlation between the victim's family economic with the phenomenon of independent development. Data was collected through structured interviews with 90 residents of Huntap, then processed with simple statistics. From the observations, residents of Huntap Pagerjurang carried out renovation efforts to suit the spatial needs of their housing unit. Their unstable family's economic conditions did not prevent them from renovating their housing unit to meet their needs. Various efforts have been made to meet this financial need. From these findings, it is suspected that the concept of a growing house that is easy to develop independently according to their users' needs should be considered in future post-disaster housing solutions.

Keywords: permanent housing, post-disaster, family's economic, independent development

LATAR BELAKANG

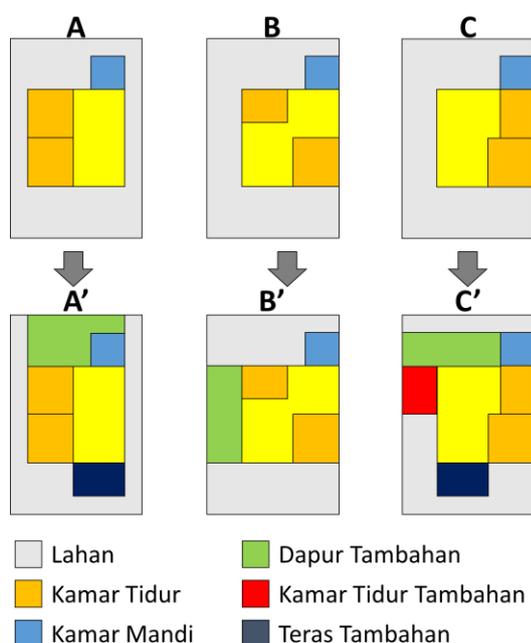
Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, dalam kondisi apapun, terutama dalam kondisi darurat bencana. Bachelor (2011) menyebutkan bahwa dalam konteks penanganan paska bencana, aspek hunian menjadi vital karena berkaitan dengan segala keperluan rumah tangga korban bencana

yang juga akan berimbas pada pemulihan paska bencana. Idealnya, dengan pemenuhan hunian dapat memberi kondisi kehidupan korban bencana yang lebih baik, lebih stabil, sehingga mendorong pemulihan sosial ekonomi keluarga korban bencana.

Dalam bencana erupsi Merapi 2010 yang lalu, masyarakat korban bencana direlokasi dan dilakukan rekonstruksi

berbasis komunitas untuk membangun unit hunian berupa rumah inti seluas 36 m² dengan lahan seluas 100 m² bagi masing-masing keluarga. Bagi masyarakat yang sebelumnya terbiasa tinggal di rumah pedesaan dengan lahan relatif luas, tentu membutuhkan banyak penyesuaian dengan kondisi ini.

Tidak hanya keterbatasan lahan, konsep rumah inti ini hanya bisa mewadahi maksimal dua kamar tidur, dengan satu kamar mandi di sisi belakang rumah, tanpa ada ruangan khusus untuk fungsi dapur. Bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan ruang lebih, mau tidak mau harus melanjutkan pembangunan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ruang masing-masing keluarga, seperti tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Contoh Penambahan Ruang pada Rumah Paska Erupsi
Sumber: survey penulis

Habraken, et al. (2014) menyebutkan bahwa perubahan fisik pada hunian dapat dilakukan dengan penambahan atau perluasan (*expansion*), penyusutan atau pengurangan (*contraction*) maupun pembagian atau penyekatan (*subdivision*). Omar, et al. (2017) menambahkan bahwa kategori perubahan hunian juga dapat terjadi dengan adanya perluasan (*extension*), penambahan lantai (*addition*), pengurangan luasan (*reduction*), penyekatan (*division*), penghilangan ruang (*removal*), maupun perpindahan fungsi ruang (*relocation*).

Avogo, et al. (2017) menyebutkan bahwa transformasi fisik hunian dipengaruhi oleh aspek *household need* dan *household assets*. Dalam kaitannya dengan ekonomi keluarga, *household assets* merupakan dana modal untuk melakukan pengembangan hunian. Puspita dan Rahmi (2018) menyatakan bahwa pemilik rumah dengan keterbatasan modal cenderung melakukan pengembangan dengan strategi pembagian ruang (*sharing of space*) atau pergantian ruang (*shifting of space*), sementara yang memiliki modal cukup lebih memilih strategi perluasan ruang (*extending of space*).

Setelah sepuluh tahun penghunian pada hunian paska erupsi Merapi di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, hampir semua hunian tetap (hunting) sudah berubah dari bentuk awalnya. Perubahan ini dilakukan dengan pendanaan pribadi dari masing-masing pemilik rumah. Banyak hunian yang bahkan telah dikembangkan hingga menjadi rumah dua tingkat. Dengan perubahan mandiri yang sangat jauh dari rumah inti hasil bantuan rekonstruksi, sangat menarik untuk mengamati kondisi ekonomi keluarga korban erupsi Merapi dalam konteks upaya dalam melakukan perubahan mandiri pada huntingnya.

Kebijakan Hunian Paska Erupsi Merapi

Material semburan Merapi pada bencana erupsi tahun 2010 telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman, DIY dan menimbun serta menghancurkan 2.682 rumah penduduk (REKOMPAK, 2012). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor 5 tahun 2011, telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada perumahan dan permukiman masyarakat korban erupsi Merapi. Salah satu kebijakan yang diambil ialah merelokasi penduduk yang semula bermukim di Kawasan Rawan Bencana III ke area yang lebih aman.

Dusun Petung, Dusun Kaliadem, dan Dusun Manggong merupakan beberapa contoh dusun yang dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Kini sebanyak 301 keluarga warga asal tiga dusun tersebut tinggal di kompleks hunian tetap (hunting) Pagerjurang, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Relokasi warga korban erupsi dilakukan dengan skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas atau REKOMPAK. Relokasi ini bertujuan untuk membangun kembali kehidupan masyarakat korban

erupsi Merapi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya.

METODE PENGUMPULAN DATA DAN TUJUAN PENELITIAN

Data dalam studi ini dikumpulkan melalui studi literatur, serta survey lapangan berikut juga wawancara terstruktur. Data didapatkan dari 90 keluarga (sebagai sampel dari total 301 keluarga) di Huntap Pagerjuran, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Data yang didapatkan diolah dengan statistik sederhana, dengan metode analisis deskriptif.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran dasar dari upaya masyarakat dalam mengembangkan huniannya secara mandiri dalam tujuan memenuhi kebutuhan ruang keluarga mereka. Studi ini ingin memperkaya diskusi dalam bidang persilangan antara ilmu ekonomi dan arsitektur dalam konteks pemenuhan kebutuhan pengembangan hunian. Sasaran dari studi ini adalah untuk melihat apakah ada masukan untuk skema penyediaan hunian paska bencana yang meringankan upaya pengembangan mandiri masyarakat korban bencana di kemudian hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Ekonomi pada Keluarga Paska Erupsi Merapi

Kehidupan ekonomi masyarakat Merapi paska erupsi tentunya mengalami perubahan drastis. Soemardi dan Dieter-Evers (2001) menyatakan bahwa kondisi perekonomian yang berubah akan ikut mengubah pula penempatan status sosial masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan yang besar bagi masyarakat korban bencana erupsi.

Saat itu, masyarakat Merapi tidak hanya harus mengungsi sementara waktu saja, mereka yang tinggal di zona merah bahkan tidak boleh kembali ke dusun tempat tinggal asal. Rumah, tanah, ladang, semua lenyap tertimbun material erupsi. Kondisi di hunian sementara (huntara) selama dua tahun pun juga terasa penuh ketidakpastian yang menimbulkan perasaan kacau.

Masyarakat Merapi sebelum erupsi mayoritas mengandalkan hidup pada sektor informal. Sebagian besar merupakan buruh tambang pasir, peternak, ataupun peladang. Hanya sebagian kecil yang memiliki pekerjaan di sektor formal. Lahan pekerjaan informal ini pun ikut menghilang dengan

adanya erupsi Merapi. Dengan demikian, dalam fase huntara tidak hanya adaptasi tempat tinggal yang dirasakan masyarakat, namun harus juga beradaptasi mencari jalan rejeki lain.

Dukungan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Korban Bencana

Bagi korban bencana yang selama ini bergantung pada pekerjaan informal dan kehilangan mata pencaharian akibat bencana, pendampingan sosial merupakan salah satu pembuka jalan menuju pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Partini, et, al., (2014) mengungkapkan bahwa 60% tempat kerja masyarakat korban erupsi ikut hancur dalam bencana. Dengan demikian, peningkatan kapasitas untuk dapat bangkit kembali sangat diperlukan oleh masyarakat.

Prinsip utama pendampingan sosial sendiri, seperti disebutkan Payne (1986,) adalah "*making the best of the clients's resources*", atau dalam Suharto (2005) disebutkan sebagai upaya membantu orang yang sedang berkesusahan agar mampu membantu dirinya sendiri. Pendampingan sosial tentu memerlukan keterlibatan dari pemerintah, pihak swasta, dan terutama partisipasi aktif dari masyarakat. Peran pendamping dalam konteks ini adalah memberi stimulus, bukan menyembuhkan maupun memecahkan masalah secara langsung. Peran utama tetap berada pada masyarakat itu sendiri.

Dalam sebuah kajian lapangan yang dilakukan oleh Masrukin et, al., (2012) tentang apa yang paling dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat paska erupsi, antara lain masyarakat membutuhkan serangkaian kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh, dimulai dari penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan. Yang sering terjadi, masyarakat tidak banyak mendapat program pendampingan yang berakibat pada kurangnya informasi mengenai keberlanjutan usaha, strategi peningkatan produktivitas, dan langkah-langkah pemasaran hasil usaha. Selain itu, disebutkan juga bahwa masyarakat memerlukan dukungan lembaga koperasi berbadan hukum yang berperan untuk mendukung perekonomian usaha dalam permodalan, pembiayaan bahan baku, dan akses jaringan pemasaran.

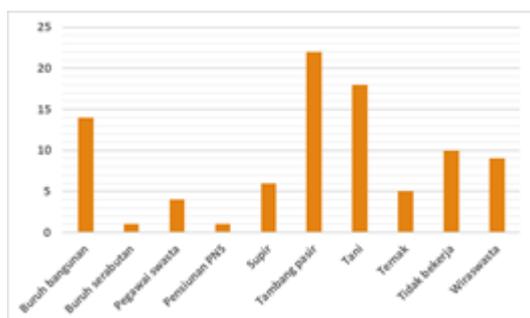
Pada saat ini, sebagai hasil dari aneka pelatihan keterampilan yang dibekalkan berbagai pihak, telah banyak usaha rumahan muncul di masyarakat Huntap. Aspek

finansial usaha ini juga sudah didukung dengan koperasi-koperasi yang terbentuk paska erupsi di Cangkringan dan sekitarnya. Koperasi-koperasi ini juga membantu pemasaran hasil usaha masyarakat Huntap. Pendampingan pun terus dilakukan oleh koperasi dengan memberi keterampilan pengolahan hasil bumi menjadi barang produksi layak pasar. Hal ini terus melahirkan usaha-usaha baru yang mayoritas dikomandani oleh ibu-ibu atau kaum perempuan Huntap.

Waryono, et al (2012) juga menyebutkan dukungan pemerintah juga nampak dalam bentuk pendampingan manajemen pengelolaan desa wisata dan vulkanologi. Bekal ini memacu masyarakat untuk membangun objek wisata Lava Tour yang menjadi lapangan kerja baru juga bagi masyarakat Huntap.

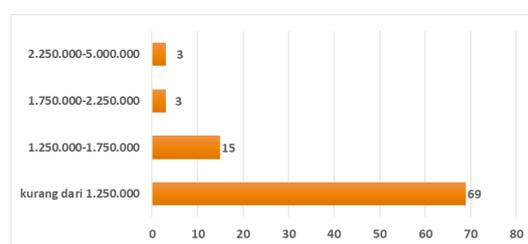
Kondisi Ekonomi Keluarga Masyarakat Korban Bencana

Paska bencana erupsi, gangguan terbesar setelah kehilangan tempat tinggal ialah kehilangan mata pencaharian bagi mayoritas masyarakat Huntap. Dari 90 responden, seperti tampak pada grafik 1 di bawah ini, mayoritas responden bekerja di bidang informal, seperti petani, peternak, penambang pasir, buruh bangunan maupun buruh serabutan. Hanya 5% memiliki pendapatan tetap sebagai pegawai swasta maupun pensiunan PNS. 10% dari responden memiliki usaha sendiri, sebagian merupakan hasil dari pelatihan keterampilan yang didapatkan dalam program paska bencana. Produk usaha keterampilan ini dipasarkan dengan pendampingan koperasi maupun LSM, juga pada kios yang ada di area masuk Huntap. Beberapa produk sudah dititipkan di toko di kota Yogyakarta, bahkan ada juga yang rajin bergabung dalam pameran UMKM.



Grafik 1. Pekerjaan Masyarakat Huntap
Sumber: analisis penulis

Dari sisi pendapatan keluarga, sebagian besar keluarga responden hidup dengan rata-rata penghasilan bulanan di bawah UMR. Hanya 6% responden memiliki penghasilan rata-rata bulanan setara atau di atas UMR. Menurut Bawole (2015), secara ekonomi kehidupan keluarga korban erupsi terlihat ada peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu drastis. Dari hasil wawancara, memang didapatkan beberapa responden yang merasa memiliki peningkatan pendapatan paska erupsi, yaitu responden penambang pasir hasil letusan Gunung Merapi. Dari studi ini, responden menyebutkan bahwa tambahan pemasukan juga didapat oleh pelaku usaha keterampilan.



Grafik 2. Pendapatan Rata-rata Bulanan Keluarga Huntap
Sumber: analisis penulis

Meskipun demikian, ada beberapa perubahan kehidupan paska bencana yang dirasakan memberatkan bagi masyarakat Huntap. Pada dasarnya, sebagian besar responden dahulu tinggal di rumah dengan lahan yang luas, sehingga dapat menanam sayur atau tanaman bumbu dapur di sekitar rumah. Demikianpun dalam hal beternak, kehidupan sebelum bencana dahulu memungkinkan mereka untuk memiliki ternak di sekitar rumah, baik dalam skala kecil hingga cukup besar. Jikalau membutuhkan area lebih untuk berladang dan beternak, termasuk merumput mencari makanan ternak, dahulu dapat dengan mudah ditemukan lahannya.

Saat ini, dengan adanya bantuan sapi, beberapa responden merasa kesulitan mendapatkan pakan ternak, karena tidak ada ladang rumput di sekitar huntap. Sebagian besar responden memutuskan untuk kembali ke area lokasi tempat tinggal mereka yang terdahulu untuk merumput. Ketika sapi bantuan pemerintah yang dimiliki beranak, dengan kapasitas kandang komunal hanya maksimal 300 ekor sapi, responden menyatakan pilihan mereka hanyalah mencari lahan sendiri untuk memelihara sapi atau menjual anak sapi tersebut.

Beberapa kondisi kehidupan Huntap yang berbeda dengan kehidupan di lokasi lama juga menimbulkan kebutuhan ekonomi baru. Seperti disebutkan sebelumnya, jarak yang jauh untuk mendapatkan pakan ternak mengharuskan masyarakat menggunakan kendaraan ataupun membayar jasa ojek untuk sampai ke ladang rumput. Isu ini senada dengan penemuan Suprpto (2016) mengenai keluhan keluarga Huntap akan adanya kenaikan pengeluaran yang diakibatkan keperluan transportasi untuk bertani dan beternak.

Kebiasaan mengisi kebun sekitar rumah dengan tanaman pangan pun kini sulit dilakukan, sehingga sebagian besar responden merasa kebutuhan untuk belanja dapur kini sangat bertambah. Satu hal yang sangat berubah ialah pengeluaran untuk air dan sampah. Dahulu masyarakat mengambil air langsung dari sumur di lahan sendiri, saat ini air disediakan komunal dan harus membayar iuran bulanan. Begitu juga dengan sampah, dahulu warga biasa memendam sampah di kebun sendiri sekaligus dijadikan kompos, saat ini sampah dikelola komunal dan perlu membayar jasa pengangkut sampah.

Hal ini menjadi cukup mengkhawatirkan, mengingat pendapat Rademache (2013) bahwa faktor ekonomi yang dirasa lebih sulit di lokasi baru kerap menjadi alasan utama bagi korban bencana untuk kembali ke lokasi tempat tinggal asal. Muir, et.,al (2019; 2020) mengkhawatirkan hal senada, kembalinya para korban bencana ke tempat tinggal lama didorong oleh harapan kesejahteraan yang lebih baik, dan hanya ketakutan akan resiko bencana berulang di kemudian hari lah yang menahan keinginan tersebut. Pendapat tersebut menggambarkan suasana batin masyarakat Huntap dengan tepat.

Kebutuhan Ruang dan Pengembangan Mandiri Huntap

Di samping isu perubahan pekerjaan, penambahan pengeluaran, masyarakat Huntap juga dihadapkan dengan kondisi fisik Huntap hasil bantuan pemerintah. Pada saat data studi ini dikumpulkan, masyarakat korban bencana erupsi Merapi telah menempati huntap selama kurang lebih 10 tahun. Bentuk asli huntap yang didirikan dengan dana bantuan pemerintah ini berupa rumah inti sederhana seluas 36 m² (gambar 2). Pada saat ini, hampir semua unit huntap sudah mengalami perubahan yang dikembangkan secara mandiri oleh

penghuninya, bahkan beberapa sudah menjadi rumah dua lantai (gambar 3).



Gambar 2. Bentuk Asli Rumah Paska Erupsi
Sumber: survey penulis



Gambar 3. Pengembangan Rumah Paska Erupsi
Sumber: survey penulis

Dari 90 unit huntap yang diamati, sebanyak 81 atau 90% sudah melakukan pengembangan mandiri, lebih dari separuh sudah mengembangkan hingga luas unit huntapnya sudah lebih dari 72 m², atau lebih dari dua kali ukuran huntap aslinya.

Pengembangan ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Towers (2005) menyebutkan bahwa tujuan utama pengembangan hunian pada umumnya ialah keinginan beralih dari situasi eksisting untuk mencapai standar ruang dalam huniannya yang lebih baik. Rumah inti yang dibangun oleh pemerintah tidak menyediakan ruang dapur, sehingga responden sebagian besar memulai dari penambahan dapur di tahun-tahun awal penghunian. Hal ini sejalan dengan pendapat Tipple (1999) bahwa hunian yang dibangun oleh pemerintah kerap tidak mewisuda kebutuhan rumah tangga penghuni, yang memicu terjadinya pengembangan ruang tambahan.

Di tahap awal penghunian ini juga responden merasa perlu meningkatkan kualitas penyelesaian bangunan setelah melalui terpaan cuaca, seperti menambah tritisan, menambah cairan pelitur pada kusen maupun mengganti pintu jendela yang lapuk terkena hujan, serta memplester dinding rumah.

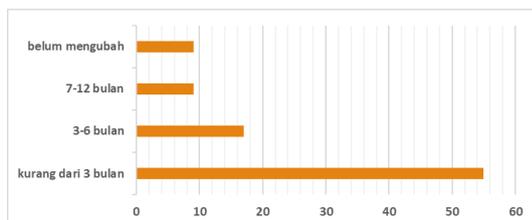
Di tahun-tahun berikutnya, responden mulai banyak yang meningkatkan kualitas hunian dengan mengganti ubin rumah, menambahkan cat dinding, dan pekerjaan-pekerjaan lain untuk membuat huniannya sesuai dengan selera keluarga mereka. Setelahnya, beberapa responden dihadapkan permasalahan kebutuhan ruang

tambahan dengan bertambahnya usia anak-anak mereka. Kebutuhan penambahan kamar tidur maupun ruang lain ini lah yang membuat sebagian responden sudah menambahkan lantai dua di unit huniannya.

Namun ternyata temuan Prawitasari (2019) mengungkapkan bahwa bahkan dengan membangun rumah berlantai dua itu pun dirasa belum mencukupi kebutuhan ruang keluarga huntap. Astuti (2015) mengemukakan kekhawatiran adanya resiko dari perombakan ruang hingga menjadi dua lantai ini apabila terjadi erupsi periodik yang besar, sehingga mengancam keselamatan penghuninya.

Pembiayaan Pengembangan Mandiri pada Hunian Tetap Paska Erupsi Merapi

Dari 81 responden yang sudah melakukan pengembangan pada unit huntapnya, 61% memulai pengembangan mandiri kurang dari 3 bulan setelah mulai berhuni (grafik 3). Semenjak dimulai, hampir separuh responden melakukan 1 hingga 2 tahap pekerjaan pengembangan huntap. Sebanyak 37% responden melakukan pengembangan dalam 3 hingga 4 tahap, sisanya sebanyak 10% mencicil pengembangan huntapnya dalam lebih dari 4 tahap. Pengembangan bertahap ini dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga masing-masing.

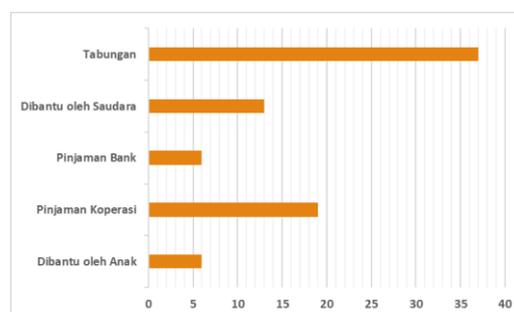


Grafik 3. Jangka Waktu Memulai Pengembangan Mandiri
Sumber: analisis penulis

Bagi responden yang bekerja di zona formal, selama menunggu tersedianya rumah bantuan mereka masih dapat menabung, sehingga dapat segera melakukan pengembangan unit huntap setelah melewati jangka waktu pendataan (satu bulan pertama penghunian). Sementara itu, bagi responden yang bekerja di bidang informal, jikalau ingin melakukan pengembangan unit huntap dengan segera, mereka akan mencari bantuan dari pihak ketiga. Bantuan ini dapat berupa bantuan dana dari anak yang merantau ke luar daerah, pinjaman berbunga ringan maupun bantuan dari sanak saudara, maupun

mengajukan pinjaman ke bank ataupun koperasi simpan pinjam (grafik 4). Bagi responden kelompok pekerja informal, opsi lainnya adalah menunda pengembangan hingga uang tabungan mereka mencukupi.

Beberapa responden juga menyebutkan bahwa mereka mengambil pinjaman dari pihak ketiga lebih dari satu kali, sesuai dengan kebutuhan pengembangan huniannya. Namun biasanya mereka menahan untuk tidak mengambil pinjaman jika masih ada hutang pelunasan pinjaman sebelumnya. Yang sulit ialah jika pada saat masih mengangsur pinjaman untuk pengembangan hunian sebelumnya, sudah terjadi kerusakan mendadak pada bagian rumah yang membutuhkan biaya pengerjaan. Dalam kondisi ekonomi terbatas ini, yang bisa dilakukan adalah melakukan penyelesaian yang bersifat sementara dahulu. Sebagai contoh, salah satu responden masih dalam kondisi mengangsur pinjaman yang digunakan untuk membangun dapur di bagian belakang rumahnya, namun mendadak ada rangka atap yang patah dan genteng pecah karena tertimpa pohon rubuh. Menambah pinjaman bukan solusi karena kemampuan membayar angsuran bulanan juga terbatas, maka atap yang rusak ditutupi dengan terpal dan bambu dahulu sampai nantinya dapat mengambil pinjaman kembali.



Grafik 4. Pembiayaan Pengembangan
Sumber: analisis penulis

Dengan melihat kondisi perekonomian keluarga yang mayoritas bergantung pada bidang informal dengan penghasilan tidak tetap, kebutuhan untuk membiayai pengembangan mandiri huntap ini tentu menjadi beban berarti. Kebutuhan pengembangan ini terus bertambah sesuai jangka waktu penghunian huntap. Pada awalnya pengembangan ini dilakukan untuk menjembatani antara kondisi rumah inti yang diberikan oleh pemerintah dengan kebutuhan keluarga. Namun mengingat status sebagai rumah tetap yang dihuni jangka panjang, di kemudian hari akan muncul kebutuhan untuk

meningkatkan kenyamanan hidup keluarga. Kini setelah 10 tahun penghunian, muncul juga kebutuhan pengembangan yang ditimbulkan oleh penyusutan kualitas hunian, seperti rangka atap maupun kusen jendela yang mulai lapuk, cat yang mulai terkelupas, maupun keperluan untuk mengulang lapisan anti bocor pada penutup atap.

Kembali masyarakat akan dihadapkan pada prioritas ekonomi keluarga, akan kebutuhan keluarga sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, dengan tabungan untuk merawat huniannya. Bagi responden yang memiliki kemampuan untuk membangun sendiri rumahnya, opsi menggunakan tenaga sendiri maupun meminta bantuan tenaga keluarga merupakan salah satu cara menghemat biaya pembangunan. Responden sebagian besar menyatakan memilih menunggu hingga betul-betul tidak bisa ditunda lagi, seperti misalnya menunggu atap bocor untuk kemudian barulah melakukan tindakan perawatan rumah. Semua itu dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hunian tetap paska bencana yang berupa rumah inti 36 m² pada lahan 100 m² dengan maksimal dua kamar tidur dan satu kamar mandi belum cukup mawadahi kebutuhan ruang masyarakat. Kebutuhan akan adanya dapur menjadi alasan utama dilakukan pengembangan mandiri. Alasan lain mulai dari kebutuhan adanya ruang tambahan lainnya, seperti kamar tidur tambahan, teras tambahan, juga menjadi pemicu pengembangan mandiri. Setelah 10 tahun penghunian, penambahan anggota keluarga maupun bertambah usianya anak-anak keluarga Huntap Pagerjurang mendorong warga untuk terus mengembangkan huniannya bahkan hingga menjadi bangunan dua lantai. Pengembangan rumah inti paska relokasi ini sepenuhnya dibiayai sendiri oleh pemilik bangunan.

Pada responden di Huntap Pagerjurang, kondisi perekonomian keluarga saat ini mayoritas masih belum stabil. Bidang pekerjaan yang didominasi oleh bidang informal, pendapatan tidak menentu, serta kondisi kehidupan huntap yang memiliki tambahan pengeluaran rutin sehari-hari, seperti biaya air dan pengelolaan sampah, menjadi tantangan bagi keluarga-keluarga

huntap. Kebiasaan hidup dahulu yang biasa digunakan untuk meringankan beban seperti beternak dan berladang juga tidak lagi bisa dilakukan dengan leluasa. Bantuan sapi perah dari pemerintah sudah berusaha membantu, namun seiring waktu masih muncul kendala terbatasnya ruang untuk perluasan kandang maupun jauhnya area untuk merumput.

Dengan kondisi latar belakang pekerjaan masyarakat dan kondisi ekonomi yang mereka hadapi, ketika muncul kebutuhan pembiayaan pengembangan unit huntap, masyarakat harus mencari segala cara untuk dapat mendanai pengembangan tersebut. Opsi mencari pinjaman biasa diambil oleh masyarakat yang memiliki penghasilan yang cukup untuk mengangsur pinjaman tersebut. Bagi yang lain, satu-satunya opsi adalah menyisihkan uang dan menabung serta melakukan pekerjaan pengembangan secara perlahan sesuai dana yang terkumpul.

Dengan adanya hasil pengamatan tersebut di atas, ada indikasi perlunya perlunya desain rumah tumbuh bagi relokasi paska bencana, dengan mempertimbangkan kemudahan warga untuk melakukan pengembangan mandiri di kemudian hari. Selain itu juga diperlukan perencanaan desa tumbuh, terutama untuk komunitas masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal dan memiliki kebiasaan beternak dan berladang. Selain menyiapkan area pengembangan kandang ternak, dari pengamatan ini juga dapat dilihat bahwa ada kebutuhan akan kebun komunal, dimana masyarakat bisa menanam tanaman konsumsi dan kebutuhan dapur untuk meringankan beban sehari-hari.

Saran/Rekomendasi

Studi ini masih menunjukkan potret sebagian kecil dari seluruh masyarakat Huntap korban erupsi Merapi 2010. Penelitian dengan cakupan yang lebih luas dapat memberi gambaran yang lebih baik akan kondisi masyarakat Huntap. Penelitian ini juga berfokus pada 90% responden yang telah melakukan pengembangan hunian, akan bermanfaat jika ada studi komparasi yang seimbang antara responden yang sudah melakukan pengembangan maupun yang belum.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, D. (2015). *Adaptasi Dan Penyesuaian Pada Interior Hunian Tetap*

- Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta Paska Bencana Erupsi Merapi. Yogyakarta: Skripsi - Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Avogo, F., Wedam, E., & Opoku, S. (2017). Housing Transformation and Livelihood Outcomes in Accra, Ghana. *Cities*, Vol.68, 92–103.
- Batchelor, V. (2011). *Tarpaulins, Transitional Shelter or Permanent Houses*. Oxford Brookes University.
- Bawole, P. (2015). Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010. *JURNAL TESA ARSITEKTUR, Volume 13, Nomor 2*.
- Habraken, N. J., Mignucci, A., & Teicher, J. (2014). *Conversations With Form: A Workbook for Students of Architecture*. Routledge.
- Masrukin, S. T., Suswanto, B., & Sabiq, A. (2012). Model Pemberdayaan Masyarakat Pascaerupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Jurnal Komunitas*, 172-184.
- Muir, J. A., Cope, M. R., Angeningsih, L. R., & Jackson, J. E. (2019). Migration and Mental Health in the Arftermath of Disaster: Evidence from Mt. Merapi, Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Omar, E., Endut, E., & Saruwono, M. (2016). Adapting by Altering: Spatial modifications of terraced houses in the Klang Valley area. *Asian Journal of Environment-Behaviour Studies*, 2(2), 1–10.
- Partini, K. B., & Suyatna, H. (2014). *Strategi Perempuan Tangguh Bencana*. Yogyakarta: Gava Media.
- Peyne, M. (1986). *Social Care in The Community*. London: McMillian.
- Prawitasari, F. (2019). Evaluasi Pasca Huni Huntap Pagerjurang Ditinjau Dari Aspek Fungsional. *Jurnal SPACE*, 6-14.
- Puspita, L., & Rahmi, D. (2018). Pengaruh Ketersediaan Modal dan Lahan terhadap Proses Transformasi Spasial HBE di Kampung Karangasem, Sleman. *ATRIUM, Vol. 4, No. 2*, 69-81.
- Rademacher, Y. (2013). Community disaster management assets: A case study of the farm community in Sussex County, Delaware. *International Journal of Disaster Risk Science*, 33-47.
- REKOMPAK. (2012). *Penanganan Dampak Erupsi Merapi*. Kementerian Pekerjaan Umum. Republik Indonesia.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumardi, M., & Dieter-Evers, H. (2001). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Suprpto, Nurmasari, R., & Rosyida, A. (2016). Kehidupan Masyarakat di Hunian Tetap Pasca Letusan Gunung Merapi 2010. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 95-102.
- Tipple, A. (1999). Transforming Government-Built Housing: Lessons from Developing Countries. *Journal of Urban Technology*, 6(3), 17–35.
- Towers, G. (2005). *An Introduction to Urban Housing Design : AT HOME IN THE CITY*. Architectural Press.
- Waryono, N., & Ghazali, H. (2012). Resilience Perempuan dalam Bencana Alam Merapi: Studi di Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta. *Jurnal Welfare*, 43-68.